

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan pemilihan judul

Semakin kompleksnya permasalahan politik dunia sekarang ini membuat semakin banyak topik yang menarik untuk dibahas, permasalahan kerjasama hubungan bilateral merupakan salah satu topik yang akhir-akhir ini kembali marak dibicarakan melihat bahwa Dewasa ini kerjasama antara negara-negara menjadi sangat diperlukan bagi setiap negara di dunia. Hal ini dilakukan karena tidak ada satupun negara di dunia yang dapat hidup sendiri dan teisolasi dari negara lain Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya kebutuhan sebuah negara, kerjasama antar negara menjadi penting untuk dilakukan. Tidak hanya antar negara saja kerjasama dapat dilakukan, namun dengan banyak negara, organisasi-organisasi internasional, dan non-government organizations. Kerjasama dilakukan dengan harapan dari kerjasama itu dapat diperoleh kerjasama yang saling menguntungkan bagi pelaku kerjasama. Dengan pertimbangan itulah sebuah negara melakukan kerjasama dengan negara lain ataupun organisasi internasional

Salah satunya hubungan kerjasama Indonesia adalah dengan negara Libya yang marak diperbincangkan, Secara umum Negara Libya adalah termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam minyaknya, dengan melihat fenomena ini, kerjasama ini tentunya dapat menguntungkan bagi Indonesia, melihat bahwa dengan masuknya minyak Libya ke Indonesia diharapkan mampu membantu

perekonomian Indonesia yang merupakan negara industri yang selalu kekurangan akan sumber daya minyak ini.

Permasalahan kerjasama Indonesia Libya ini menjadi menarik untuk dibahas karena disamping kerjasama ini sangat berarti bagi Indonesia juga berarti bagi Libya, yang diharapkan dengan kerjasama ini merupakan awal dari pencitraan yang baik bagi Dunia internasional setelah dicabutnya embargo ekonomi internasional oleh negara Barat bagi negara Libya. Dan hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk memilih topik **KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-LIBYA PASCA DICABUTNYA EMBARGO INTERNASIONAL TERHADAP LIBYA TAHUN 2003** sebagai topik yang akan dibahas pada skripsi ini.

B. Latar belakang masalah

Berdasarkan sejarahnya Hubungan diplomatik Indonesia-Libya pernah terjalin pada masa lalu, tepatnya pada awal-awal kemerdekaan kedua negara. Kerjasama ini terselenggara dengan cara tidak langsung melalui forum-forum atau wahana multilateral seperti didalam Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok, OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimulainya hubungan diplomatic secara bilateral yaitu ketika ditandatanganinya komunitas bersama Republik Indonesia dengan negara Libya oleh wakil tetap RI untuk PBB, Duta Besar Nana Sutrisna, dengan wakil tetap Negara Libya untuk PBB, Duta Besar Dr. Ali A. Treikei pada tanggal 17 oktober 1991 di New York¹

Namun, karena adanya kecurigaan keterlibatan Libya didalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh sebagian perwira militer RI, maka membuat hubungan bilateral yang terjalin diantara keduanya menjadi agak terganggu, dan tidak dapat ditindaklanjuti untuk sementara waktu menunggu kejelasan permasalahan tersebut dari kedua belah pihak, hal ini di perburuk lagi dengan keluarnya sanksi internasional oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Libya pada tahun 1992 yang mana di dalam resolusi nomor 748 tanggal 31 maret 1992 yang berisi salah satunya mengenai pelarangan dan pembatasan hubungan diplomatik/konsuler terhadap negara Libya (embargo internasional),

Munculnya berbagai masalah ini membuat hubungan bilateral Indonesia-libya mengalami stagnasi (terhenti sementara waktu) walaupun pada tanggal 1995 negara Libya membuka dan menempatkan kembali duta besarnya di Jakarta namun karena Indonesia menganut kebijakan dan tindakan politik luar negeri yang berbasas konsentris sebagai anggota PBB maka Indonesia mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh PBB tersebut.

“EMBARGO”, kata inilah yang sekarang menjadi momok yang paling ditakuti oleh Negara-negara di dunia khususnya di Negara-Negara berkembang termasuk Libya, menurut wikipedia, embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasiannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut menderita karena

Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan². Hal inilah yang terjadi terhadap negara-negara yang radikal dan anti campur tangan asing/barat dalam pembangunan negaranya termasuk keluarnya Embargo ekonomi terhadap Libya pada masa itu

Secara umum Libya merupakan salah satu negara penghasil minyak yang terletak dibagian utara benua Afrika. Libya merdeka pada tanggal 24 Desember 1951 dari Italia, dan berbentuk kerajaan di bawah pimpinan raja Idris I. Di bidang hubungan luar negeri Libya semasa pemerintahan raja Idris I menjalin hubungan luar negeri yang cukup baik dan normal dengan banyak negara yang ada di sekitarnya, baik yang ada dikawasan Afrika, Timur Tengah maupun yang ada di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dan yang terpenting adalah terjalinnya hubungan Libya dengan Liga Arab pada bulan Maret 1953. Di masa itu juga hubungan Libya dengan negara Eropa Barat dan Amerika Serikat lebih dekat, karena raja Idris I memang cenderung pro Barat dan banyak menggantungkan perkembangan serta kemajuan ekonominya pada negara Barat

Namun seiring dengan kesuksesan dalam penemuan sumber minyak bumi yang menjanjikan perbaikan ekonomi bagi rakyat Libya, serta diikuti pula dengan banyaknya korupsi yang semakin merajalela dikalangan pejabat pemerintahan Libya, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu menyolok antara masyarakat kota yang satu dengan masyarakat kota yang lain di beberapa kota di Libya. Hal inilah yang menimbulkan rasa tidak puas pada masyarakat

²“Embargo”, *Wikipedia Indonesia*, 23 Oktober 2007

Libya sehingga membuat sekelompok perwira muda melakukan revolusi di bawah kepemimpinan Kapten Muammar Khadafi.³

Libya dibawah pimpinan khadafi mengalami inflasi yang sangat signifikan dibidang ekonomi. Akan tetapi politik luar negeri khadafi yang cenderung radikal dan menolak dominasi barat, menimbulkan ketegangan antara Libya dan negara-negara Barat. Hal ini terbukti dengan dibuatnya sanksi internasional oleh DK PBB. Adanya sanksi internasional yang dibuat oleh DK PBB ini tentunya membuat negara ini mengalami keterasingan dalam pergaulan internasional.

Selama terisolasi berbagai kerugian mulai terasa di negara ini Libya tidak dapat lagi melakukan kerjasama dengan negara lain yang notabene dapat menguntungkan negara serta tercapainya kepentingan nasionalnya disamping minimnya sumber daya non migas yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kopi, lada, gandum, kayu, bahkan teknologi hal ini yang membuat Libya ingin keluar dari status isolasi dan kembali menjalin kerjasama internasional⁴,

Setelah terisolasi selama 11 tahun. (1992-2003 : atas kasus Lockerbie) akhirnya keluarlah Keputusan untuk menghentikan sanksi ekonomi internasional terhadap Libya yang telah dibakukan tahun 1999 namun, secara resmi ditandatangani oleh Presiden Bush pada 12 September 2003, hal ini dilakukan sebagai balasan dari kesediaan Libya untuk menghentikan dan membongkar program persenjataannya serta hasil dari kampanye intensif selama 3 tahun sejak akhir 1999 bahwa libya akan mendukung sepenuhnya agenda global perang melawan teroris yang dicanangkan oleh Dunia Barat serta penghentian program

³ Sidik Jatmika, *Politik Timur Tengah*. Diktat perkuliahan Politik Timur Tengah tidak di terbitkan 2004. hal 228.

⁴ Tajuk rencana Kompas "Libya" Jumat, 28 Januari 2005

nuklir dan bersedia membayar kompensasi sebesar 2,7 miliar dollar AS kepada 270 korban musibah pesawat Pan AM tahun 1988 di atas udara Lockerbie, skotlandia yang di bom oleh Libya⁵ sebelumnya pembekuan sanksi internasional terhadap Libya telah terjadi pada tahun 1999. namun barulah tahun 2003 secara resmi Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi embargo atas Libya dengan ditandatanganinya penghentian sanksi embargo ini oleh presiden Bush⁶.

Setelah di cabutnya sanksi internasional dari negara Libya perubahan dan pembaharuan mulai terasa di pemerintahannya. Negara yang semula terisolasi dari pergaulan internasional kini mulai terbuka dengan negara luar, keterbukaan itu disambut oleh Indonesia, pernyataan bahwa Libya tidak mempunyai keterlibatan terhadap GAM bahkan menentang segala bentuk separatisme dan bersedia membantu Indonesia menyelesaikan masalah aceh (GAM)⁷. Yang meyakinkan presiden megawati untuk dapat melakukan kerjasama yang cooperative dan saling menguntungkan.

Presiden Megawati Sukarno Putri kemudian melalui department perdagangannya mengirimkan surat yang berisi mengajak Libya untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia khususnya dalam hal ekonomi, perdagangan, dan investasi. Surat yang dikirim oleh pemerintah Indonesia ternyata disambut baik oleh Muammar Khadafi yang masih menjabat presiden Libya, dan jadilah Indonesia sebagai negara kedua yang menjalin hubungan

⁵ "Fokus Asia", *Mediacorpradio*, 23 Oktober 2007

⁶ DK PBB Cabut Sanksi atas Libya, *Kompas*, 13 September 2003

kerjasama dengan Libya setelah Perdana menteri Spanyol. (Jose Maria Aznar)

Setelah pencabutan negara ini dari status negara terisolir⁸

C. Tujuan penulisan

1. Ingin menjawab pokok permasalahan dalam skripsi ini
2. Ingin mengetahui kepentingan apa saja yang akan di dapatkan oleh Indonesia dan Libya dari kerjasama ini

D. Pokok permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, muncul permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini yaitu : " bagaimana Indonesia membangun hubungan bilateral dengan Libya pasca dicabutnya embargo internasional terhadap Libya? ".

E. Kerangka Berfikir

Dalam berhubungan dengan negara lain, sebuah negara mempunyai politik luar negeri yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara pemerintah suatu negara dengan negara lain.

Untuk membahas pokok permasalahan diatas digunakan konsep kerjasama internasional. Yang juga mencakup konsep kerjasama dan konsep kerjasama bilateral.

⁸ Monev Hasil Laporan Presiden ke Libya. Kompas, 26 September 2002

1.Konsep Kerjasama Internasional

Setiap negara di dunia ini bahkan negara-negara maju sekalipun pasti akan membutuhkan bantuan dan kerjasama dari negara lainnya. Oleh karena itu kerjasama internasional merupakan sebuah hal yang sangat penting dan mutlak untuk dilakukan bagi setiap negara. Kerjasama ini dapat diwujudkan dalam berbagai hal, misalnya saja dalam bidang ekonomi, militer, dan sebagainya.

a. **Kerjasama** menurut KJ Holsti menyatakan bahwa sebagai transaksi dan interaksi diantara negara-negara dalam sistem internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama.⁹

Dalam hal kerjasama internasional dikenal adanya kerjasama bilateral, kerjasama trilateral, dan kerjasama multilateral, selain itu juga yang dinamakan kerjasama regional, yakni kerjasama antar negara yang berada dalam suatu kawasan tertentu.

⁹ K. HOLSTI, "Dinamika Internasional: Konsep dan Teori", UIJG, Edisi ke-1, tahun 1987

Kerjasama yang terjadi antara pemerintah Indonesia-Libya adalah kerjasama bilateral ekonomi. dimana. Kerjasama ekonomi ini tertuang dalam beberapa kegiatan ekonomi, misalnya: kegiatan ekspor impor, investasi, dan bantuan ekonomi.

b. **Kerjasama Bilateral** dalam wikipedia, diartikan sebagai kerjasama antara dua Negara (*inter government*) untuk mencapai tujuan bersama. yang masing- masing negara memiliki kepentingan nasional yang sama pada suatu kondisi dan berbeda pada kondisi yang lain. Apabila dua negara memiliki kesamaan kepentingan maka terbuka peluang untuk diadakan suatu bentuk kerjasama. Namun walaupun kepentingan berbeda suatu kerjasama bisa terjalin sepanjang mendukung masing-masing kepentingan kedua negara¹⁰

Indonesia mempunyai kepentingan dalam hubungannya dengan Libya yaitu diantaranya masalah ekonomi. Indonesia merasa perlu menjalin hubungan yang baik dengan Libya untuk meningkatkan pasokan minyak kedalam negeri Indonesia, sedangkan Libya memiliki kepentingan yaitu untuk mendapatkan produk yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti tekstil dan garmen, sepatu, perlengkapan kamar mandi, produk makanan, teh, kopi, bumbu dapur, kayu, furniture, gelas dan peralatan dari plastik, kertas dan alat-alat kantor, elektronik, ban, produk karet, minyak sayur dan nabati, hingga suku cadang kendaraan dan

pesawat terbang serta tujuan yang paling utama sebagai upaya peningkatan citra positif di dalam pergaulan internasional.

Selain konsep kerjasama internasional, di dalam menjelaskan cost-benefit dari kerjasama diantara kedua negara Indonesia-Libya, penulis mengambil teori proses pembuatan kebijakan luar negeri berdasarkan aktor rasional.

2. Aktor Rasional

Menurut Graham T. Allison bahwa model ini memandang bahwa politik luar negeri sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama pemerintah yang monolit, yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Keputusan politik luar negeri diambil melalui proses intelektual untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan dan dipilihlah satu keputusan dengan menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Dengan demikian, para analis politik luar negeri dengan menggunakan model ini harus memfokuskan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, pada perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.¹¹

Di dalam penulisan ini ketika Indonesia terkena krisis dalam hal produksi minyak dalam negeri Indonesia tahun 2003 upaya pemerintah untuk mengatasinya dengan cara melakukan hubungan bilateral dengan Libya yang mempunyai tingkat produksi minyak yang lebih besar. Kebijakan Indonesia ini adalah rasional mengingat pertama, pentingnya suntikan Minyak kedalam negeri untuk menjaga stabilitas perkembangan industri di di Indonesia. Kedua, dengan menjalin

kerjasama dengan Libya, pemerintah berharap Indonesia juga mampu diterima di negara kawasan Afrika lainnya yang tentunya memperkuat eksistensi Indonesia di kancah Internasional dengan melakukan kerjasama yang tentunya menguntungkan bagi Indonesia.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian Penulisan ini berdasarkan pada proses kedua negara dalam membangun kerjasama bilateral pasca embargo ekonomi internasional terhadap Libya pada tahun 2003, sebagaimana diketahui bahwa Libya diembargo sejak 1992 dan secara resmi dicabut pada tahun 2003 yang sebelumnya telah dibekukan tahun 1999. Analisis terhadap kerjasama dilakukan setelah embargo dicabut yaitu tahun 2003-2004.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan teknik penggunaan data sekunder yang diperoleh dari makalah, diktat, jurnal, Ensikopledi, Media Massa baik cetak maupun elektronik, internet, serta sumber pendukung lainnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I :Pendahuluan, yang meliputi : Alasan pemilihan judul, Latar belakang Masalah, Tujuan penulisan, Pokok permasalahan, Kerangka berfikir, Jangkauan penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan

BAB II : Pada bab ini penulis akan membahas tentang hubungan luar negeri Indonesia terhadap Libya sebelum embargo internasional terhadap Libya yang meliputi dasar-dasar kebijakan luar negeri Indonesia dan Libya serta hubungan yang pernah terjadi diantara keduanya

BAB III : Pada bab ini penulis akan membahas tentang proses perjanjian kerjasama kedua negara (Indonesia-Libya) pasca dicabutnya embargo internasional terhadap Libya yang dimulai dari ketertarikan Indonesia untuk bekerjasama dengan Libya, sambutan yang baik dari Libya terhadap ajakan Indonesia untuk bekerjasama sampai pada Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dan sifat Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Libya

BAB IV : pada bab ini penulis fokus terhadap Analisis tentang cost-benefit dari adanya kerjasama antar kedua negara dalam hal ekonomi dan politik